

Buletin
CIPTAKARYA

KARYA CIPTA INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

**TANGGAP TANGANI BANTUAN AKIBAT BENCANA
LETUSAN GUNUNG LEWOTOBI LAKI-LAKI**





BERITA UTAMA 04

Tanggap Tangani Bantuan
Akibat Bencana Letusan Gunung
Lewotobi Laki-laki

INOVASI 19

Peningkatan
Perekonomian Warga
Kampung Kais Sorong
Selatan

LIPUTAN KHUSUS 08

Kawasan Pusaka Benteng
Pendem Wajah Pariwisata
Heritage di Jawa Timur

22

SPAM Pantai Selatan
Penuhi Kebutuhan Air
Minum

14

Pasar Negara Jembrana
Resmi Beroperasi

INFO BARU 18

Belajar Penataan Lanskap,
SLCAAB Studi Banding ke
Kampus PU

28

Memorial Living Park Menjadi
Magnet Baru dalam Sejarah
Aceh

POJOK IKN 32

Masjid Negara IKN Bisa
Untuk Salat Idulfitri 2025



ANDA PERLU TAHU 34

Dukungan Sarana dan
Prasarana Natal 2024 dan
Tahun Baru 2025

CIPTAKARYA

Buletin

Pelindung

Diana Kusumastuti

Penanggung Jawab

Riono Suprpto

Dewan Redaksi

Pandu Gunadi Atmosukarto,
Cakra Nagara, Johannes Wahyu
Kusumosusanto, Tanozisoichi Lase,
Anang Muchlis, Bisma Staniarto, Essy
Asiah, Dian Irawati

Pemimpin Redaksi

Ary Prasetyo

Penyunting Naskah

Cahyani Kusriandingsih, Daniel, Dian
Maryati, Indah Raftiarty ER

Bagian Produksi

Harniati Ulfah, Bramanti Nawang Sari,
Ari Iswanti

Sekretariat

Nadhira Nurfitriani, Rizqiah
Darmawiasih, Muljiyah Nur Muharom,
Deandra Adhyrasanti, Gusti Eka
Damarwana

Kontributor/ Pembuat Artikel

M. Danial, Putri Intan Suri, Oscar
R.H. Siagian, Marsaulina Farida
Masniari Pasaribu, Dades Prinandes,
Rahadian, Usman Hermanto, Fajar
Santoso Hutahaean, Balai Prasarana
Permukiman Wilayah, Balai Teknik
Direktorat Jenderal Cipta Karya

Alamat Redaksi

Jl. Pattimura No. 20,
Kebayoran Baru 12110
Telp/Fax. 021-7245754

Redaksi menerima saran maupun
tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke
email kompuck@pu.go.id atau saran dan
pengaduan di www.pu.go.id

Cover : Ilustrasi Bencana Gunung
Lewotobi Laki-Laki

BERGERAK CEPAT MEMBANTU PENANGANAN BENCANA

Indonesia merupakan negara yang rawan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir dan angin puting beliung. Sekitar 13 persen gunung berapi dunia yang berada di kepulauan Indonesia berpotensi menimbulkan bencana alam dengan intensitas dan kekuatan yang berbeda-beda.

Salah satunya yaitu Gunung Lewotobi Laki laki, Nusa Tenggara Timur (NTT). Gunung api setinggi 1.584 meter di atas permukaan laut (mdpl) itu meletus disertai gemuruh sedang dan kuat. Gunung itu erupsi pada Selasa (3/12/2024) dini hari sejak pukul 00.00 Wita hingga 06.00 Wita.

Ditjen Cipta Karya melalui Satgas Tanggap Darurat Bencana dengan cepat membantu penanganan bencana dengan menyediakan berbagai macam kebutuhan utama, antara lain sarana dan prasarana air minum dan sanitasi untuk masyarakat terdampak bencana tersebut.

Lebih lengkapnya mari kita simak dalam Buletin Cipta Karya Edisi ini.

TANGGAP TANGANI BANTUAN AKIBAT BENCANA LETUSAN GUNUNG LEWOTOBI LAKI-LAKI

Penulis: Sadria Asten / BPPW Nusa Tenggara Timur



Gunung Lewotobi Laki-laki mengalami erupsi pada awal November dengan kolom asap tidak teramati. Erupsi tercatat di seismograf dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi kurang lebih 24 menit 10 detik.

Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki menyebabkan hujan material, luncuran awan panas, dan aliran lava yang bergerak ke Jalan Trans-Flores. Selain kerusakan pada infrastruktur, erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki juga menyebabkan kerusakan pada rumah warga serta menyebabkan korban jiwa. Sebanyak 9 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, 32 orang

luka ringan serta 11.553 masyarakat terpaksa harus mengungsi.

Terdata sekitar 2.384 unit rumah terdampak tersebar di 7 desa di Kecamatan Wulanggitang yaitu Desa Pululera, Nawokote, Hokeng Jaya, Klatanlo, Boru, Boru Kedang, Waiula dan 3 desa di Kecamatan Ile Bura, yaitu Desa Dulipali, Nobo, dan Desa Nurabelen. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Nusa Tenggara Timur (NTT) bergerak cepat membantu penanganan bencana akibat letusan Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, NTT.

Upaya tanggap darurat yang dilakukan oleh Tim Tanggap Darurat Bencana BPPW NTT adalah dengan mengerahkan 1 unit mobil tangki air, 1 unit mobil *dump truck*, 2 unit *toilet portable*, 3 unit hidran umum, dan 4 orang personil untuk membantu penyaluran air bersih dan penyediaan toilet umum di *camp* pengungsian.

Kepala BPPW NTT Davis Hamid menjelaskan, para pengungsi tersebar di delapan titik pengungsian di wilayah Flores Timur dan Kabupaten Sikka. Bantuan yang diberikan oleh BPPW NTT yaitu dengan terus menyediakan sarana air bersih dan sejumlah toilet darurat bagi masyarakat di tempat pengungsian akibat bencana letusan gunung berapi Lewotobi Laki-laki.

Lanjut Davis, tim Tanggap Darurat Bencana BPPW NTT sudah tiba di lokasi pengungsian sejak awal terjadinya bencana untuk membantu menyiapkan kebutuhan air bersih dan sanitasi.

“Tim kita sudah di tempat pengungsian sejak awal November dan setiap harinya kami menyalurkan kurang lebih 16.000 liter air bersih bagi masyarakat terdampak bencana gunung meletus,” ujar Davis. Penyaluran air bersih yang dilakukan oleh tim Tanggap Darurat Bencana BPPW NTT adalah untuk kebutuhan mandi, cuci dan juga untuk kebutuhan di dapur umum. Selain pada posko tempat pengungsian





penyaluran air bersih juga dilakukan di rumah warga karena sebagian masyarakat pengungsi juga masih berada di rumah masing-masing yang tersebar di beberapa kecamatan,” ungkap Davis.

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti yang meninjau langsung lokasi pengungsian korban bencana letusan Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, NTT pada Minggu (24/11/2024) menyampaikan bahwa upaya tanggap darurat terus dilakukan Kementerian PU dengan menyalurkan layanan air bersih dan sanitasi, termasuk memobilisasi alat-alat berat untuk membuka kembali akses masyarakat. Selain itu, pemerintah sedang berupaya untuk membangun Hunian Tetap (Huntap) dan Hunian Sementara





(Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana letusan Gunung Lewotobi Laki-laki.

Saat ini, pemerintah bersama masyarakat tengah melakukan survei untuk menentukan lokasi pembangunan Huntap bagi masyarakat terdampak bencana dengan kriteria lokasi memiliki kontur datar, struktur tanah atau batuan aman, dekat jalan nasional, dan merupakan pilihan warga. "Rencananya Huntap untuk membantu hunian bagi 2.700 KK masyarakat terdampak bencana," ungkap Diana. Kementerian PU akan mendukung pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial di lokasi Huntap bagi masyarakat terdampak, seperti sarana penyediaan air minum dan sanitasi, termasuk perbaikan sekolah dan rumah ibadah.

Selain itu juga akan memfasilitasi akses jalan masuk ke lokasi Huntap yang telah disetujui masyarakat terdampak, serta berkolaborasi dengan BNPB dan Zipur TNI menyiapkan lahan atau *clearing* lahan untuk pembangunan Huntara di Desa Konga yang merupakan lokasi terpilih.



KAWASAN PUSAKA BENTENG PENDEM WAJAH PARIWISATA *HERITAGE* DI JAWA TIMUR

| Penulis: Bagus Andika / BPPW Jawa Timur





Direktur Bina Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya Cakra Nagara dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur Airyn Saputri Harahap mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dalam rangka memantau langsung Rehabilitasi Bangunan Kawasan Pusaka Benteng Pendem di Kabupaten Ngawi, Minggu (03/11/2024).

Dalam kunjungan tersebut, Airyn menjelaskan tentang capaian hasil yang telah selesai dikerjakan oleh Kementerian PU untuk Rehabilitasi Bangunan Kawasan Pusaka Benteng Pendem.

Seusai meninjau kondisi fisik bangunan benteng, Gibran menginstruksikan guna mempercepat persiapan peresmian Benteng Pendem yang selesai direhabilitasi. Gibran juga berkoordinasi dengan Menteri Kebudayaan untuk mempertimbangkan langka restorasi lebih lanjut.

BPPW Jawa Timur pada tahun 2020-2022 telah selesai melakukan Rehabilitasi Bangunan Kawasan Pusaka Benteng Pendem di Kabupaten Ngawi dengan luas bangunan 7.975 m², luas kawasan inti 48.484 m² dan ada 13 jumlah massa bangunan serta pekerjaan meliputi pekerjaan struktur, arsitektur, MEP gedung,

dan pedestrian. Saat ini, kawasan Benteng telah dibuka secara umum sehingga masyarakat dapat melihat secara langsung situs bersejarah.

Turut hadir mendampingi Wapres, Pj Gubernur Jawa Timur, serta Pjs Bupati Ngawi bersama FORKOPIMDA Kabupaten Ngawi.



PASAR NATAR WUJUDKAN SWASEMBADA PANGAN TAHUN 2028

| Penulis: Sonya Tiara / BPPW Lampung



Pasar Natar merupakan pasar yang telah mengalami banyak peristiwa kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran, saat ini Pasar Natar telah dibangun dengan baik dan kedepannya diharapkan Pasar Natar dapat menjaga inflasi harga pangan di Provinsi Lampung, serta dapat mewujudkan arahan Presiden RI untuk Swasembada Pangan pada tahun 2028.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang didampingi oleh Direktur Prasarana Strategis Essy Asiah saat meresmikan Pembangunan Pasar Natar Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Jumat (15/11/2024).

Kegiatan rekonstruksi Pasar Natar dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian



Pekerjaan Umum melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Lampung yang dimulai pada Bulan Desember tahun 2023. Saat ini terbangun sebanyak 496 lapak meja, 256 kios, 22 ruko, dan 5 los kosong, dan dapat mengakomodir sebanyak 779 pedagang yang terdiri dari dua lantai.

Zulkifli mengharapkan, pembangunan Pasar Natar dapat memperbaiki kondisi fisik pasar, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan

menyediakan tempat bagi para pelaku usaha untuk menjual komoditas yang mendominasi di Kabupaten Lampung Selatan.

Peresmian tersebut dihadiri oleh Pj. Gubernur Lampung Samsudin, Staf Ahli Menteri PU Bidang Ekonomi dan Investasi R. Adj. Canka Amprawati Suryadi Putri, Irjen Kemendag Putu Jayan Danu Putra, Dirjen PDN Kemendag Moga Simatupang, serta Pj. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto.



SPAM REGIONAL JATILUHUR I MULAI BEROPERASI DAN LAYANI 1,9 JUTA MASYARAKAT

Penulis: Elmy / Direktorat Air Minum



Ditjen Cipta Karya telah menyelesaikan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur. Pada Rabu (18/12/2024) SPAM Regional Jatiluhur telah siap beroperasi dan akan didistribusikan kepada 380.000 Sambungan Rumah (SR), serta telah digunakan oleh 1,9 Juta masyarakat di wilayah DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti menjelaskan, setelah melalui masa konstruksi selama 35 bulan, air siap minum dari SPAM Regional Jatiluhur I sudah dapat dinikmati oleh puluhan ribu masyarakat.

“Saya berharap dengan beroperasinya KPBU SPAM Regional Jatiluhur I dapat mengurangi pemanfaatan air tanah di Jakarta sehingga dapat menekan *land subsidence* dan mendukung peningkatan kesehatan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di wilayah Jabodetabek,” kata Diana.

Proyek ini dibangun melalui skema KPBU dengan inisiatif pemrakarsa (*unsolicited*) dan mampu menyediakan pasokan air minum hingga 4.750 liter/detik. SPAM tersebut memanfaatkan air baku dari Bendungan Jatiluhur di Jawa Barat.

Lingkup kegiatan Proyek KPBU pada Sistem Hulu meliputi pembangunan intake, Pipa Transmisi



Air Baku dan Pipa Transmisi Air Minum Curah, 2 (dua) Instalasi Pengolahan Air (IPA), dan jaringan distribusi utama hingga titik pasokan (*offtake*). IPA Bekasi berkapasitas 4.400 lpd akan melayani 4 (empat) *Offtake* yaitu *Offtake* Jatibening, *Offtake* Teluk Buyung, *Offtake* Sentra Timur, dan *Offtake* Tarumajaya. Sedangkan IPA Cibeet berkapasitas 350 lpd akan melayani *Offtake* Karawang. Adapun pada Sistem Hilir untuk Wilayah DKI Jakarta akan dialiri dari *Offtake* Sentra Timur menuju 2 (dua) *Reservoir* yaitu *Distribution center* (DC) Pondok Kopi dan Cilincing. *Reservoir* DC Cilincing dengan kapasitas 20.000 m³ akan mengalir melayani masyarakat di 7 kelurahan dengan total 15.310 SR baru. Sementara *Reservoir* DC Pondok Kopi dengan kapasitas 5.000 m³ akan mengalir melayani masyarakat di 2 kelurahan dengan total 2.000 SR baru.

Sejalan dengan Wamen PU, Plt Dirjen Cipta Karya Endra S. Atmawidjaja mengungkapkan salah satu tujuan dibangunnya SPAM Jatiluhur I yaitu untuk menangani *land subsidence* atau penurunan

permukaan tanah yang ada di wilayah Pantai Utara Jakarta.

“Selain untuk membantu memenuhi akses air minum layak bagi masyarakat di Jakarta, tentu juga untuk mengurangi pengambilan air tanah yang dapat menahan laju penurunan permukaan tanah,” tutur Endra.



PASAR NEGARA JEMBRANA RESMI BEROPERASI

| Penulis: M. Fajri Andika / Direktorat Prasarana Strategis



Pasar Umum Negara di Kabupaten Jembrana, Bali, diresmikan pada Senin (25/11/2024) dan dihadiri oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Staf Ahli Menteri PU bidang Ekonomi dan Investasi Canka Amprawati Suryadi Putri, Bupati Jembrana I Nengah Tamba, Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya Essy Asiah dan Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyelesaikan pembangunan Pasar Negara untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Jembrana.

Staf Ahli Menteri PU Bidang Ekonomi dan Investasi Canka mengatakan, pembangunan pasar dilakukan

dengan meningkatkan fungsi pasar sebagai sarana perdagangan rakyat yang aman, nyaman, bersih, tertata, dan lebih estetik (tidak kumuh).

Canka juga menegaskan pentingnya revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya strategis meningkatkan daya saing pasar lokal sekaligus memberikan fasilitas yang layak bagi pedagang dan masyarakat. Sementara itu, Direktur Prasarana Strategis Essy Asiah menyampaikan bahwa pembangunan Pasar Negara adalah komitmen Kementerian PU dalam mendukung infrastruktur ekonomi rakyat.

“Pasar Negara dirancang dengan pendekatan modern yang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kearifan lokal. Kami ingin pasar ini menjadi model bagi pembangunan pasar tradisional lainnya di Indonesia,” ujar Essy.



Pembangunan Pasar Negara dikerjakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Bali Ditjen Cipta Karya di atas lahan seluas 24.136 m² yang meliputi Gedung A dan Gedung B dengan total luas bangunan 17.652 m².

Kedepannya pasar ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui pengelolaan yang profesional,



berkelanjutan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengelolaan pasar yang baik juga memperhatikan kebersihan pasar, serta pengelolaan sampah dan limbah yang efektif menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung keberlanjutan pasar. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Balai PPW Bali Andreas Budi Wirawan dan Kasubdit Wilayah I Direktorat Prasarana Strategis Feriqo Asya Yogananta.



SIMBOL KERUKUNAN DAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA

Penulis: Sony Satriadyi / BPPW Jakarta Metropolitan



Keberadaan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang berdekatan menjadi simbol kerukunan antar pemeluk agama di Indonesia.

Hubungan ini semakin erat dengan adanya Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah tersebut dan telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto didampingi Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dan Wakil Menteri Pekerjaan

Umum Diana Kusumastuti pada Kamis (12/12/2024).

“Terowongan ini merupakan suatu simbol kerukunan antar umat beragama yang menjadikan bangsa Indonesia memiliki ciri yang sangat unik dan membanggakan yaitu bangsa yang penuh perbedaan,” kata Prabowo.

Terowongan Silaturahmi dibangun sejak Desember 2020 dengan lingkup pekerjaan terowongan, *shelter* sisi Istiqlal, *shelter* sisi Katedral, perkerasan di atas



terowongan dan lanskap area *shelter*.

Terowongan ini berada di bawah permukaan tanah sedalam 6 meter dengan panjang 28,3 meter, tinggi 3 meter dan lebar 4,1 meter.

Di dalam terowongan ini terdapat galeri diorama hasil karya seniman Sunaryo dengan “Wot Hati” yang memiliki arti Jantung Hati.

Selain itu juga diperdengarkan berbagai suara sebagai simbol keberagaman agama dan diperindah dengan

cahaya yang tidak putus pada *railing* Terowongan Silaturahmi yang menjadi simbol jabat tangan.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, keberadaan Terowongan Silaturahmi ini bertujuan untuk memudahkan akses jemaah antar bangunan ibadah dan untuk memenuhi kebutuhan ruang parkir hingga dapat menampung 800-1.000 kendaraan tanpa mengganggu arus lalu lintas.

Turut hadir dalam peresmian tersebut, Direktur Bina Penataan Bangunan Cakra Nagara dan Kepala BPPW Jakarta Metropolitan Indah Widi Hapsari.



BELAJAR PENATAAN LANSKAP, SLCAAB STUDI BANDING KE KAMPUS PU

Penulis: Kemal Rendy / Direktorat SSPIP



Direktur Sistem dan Strategi Pengembangan Infrastruktur Permukiman (SSPIP), Ditjen Cipta Karya Pandu Gunadi Atmosukarto beserta jajaran menerima kunjungan delegasi *Shanghai Landscaping and City Appearance Administrative Bureau* (SLCAAB) di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (20/11/2024). Kunjungan ini merupakan kegiatan studi banding ke Kantor Kementerian PU dengan tujuan mendapatkan insight baru sekaligus menginspirasi SLCAAB dalam pengembangan lanskap dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

“Pembangunan Kantor Kementerian PU atau yang biasa kita sebut Kampus PU ini memang menerapkan konsep bangunan gedung hijau atau *green building* guna mewujudkan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” ujar Pandu.

Dalam kesempatan tersebut, Pandu menambahkan konsep tersebut juga diterapkan pada pembangunan

infrastruktur bidang PU seperti jalan tol, jembatan, bendungan, embung, dan bangunan gedung lainnya di seluruh Indonesia.

General Director of SLCAAB Jianping Deng menyampaikan Kementerian PU dapat menjadi galeri pembangunan infrastruktur dan contoh bagaimana membangun infrastruktur Indonesia. “Kunjungan ini menjadi penting untuk kami karena sangat menginspirasi. Kita melihat banyak area hijau, kebun binatang mini, serta adanya inovasi pengolahan limbah dan air hujan,” ungkap Jianping.

Secara keseluruhan Kantor Kementerian PU memperhatikan lebih banyak penerangan alami dari sinar matahari pada siang hari, serta menerapkan sistem daur ulang penggunaan air untuk menghemat konsumsi air melalui sistem *rain water harvesting*, *recycling*, dan *reuse*.

Implementasi lanskap infrastruktur yang berkelanjutan juga diterapkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN. Pembangunan KIPP yang mengusung konsep “*Future Smart Forest City*” ini memiliki area sumbu kebangsaan yang menjadi simbol hubungan harmonis antara alam, manusia, dan nilai luhur kebudayaan. Adapun sumbu kebangsaan terdiri dari istana presiden, plaza seremoni, beranda Nusantara, plaza bhineka dan titik 0 nusantara.



PENINGKATAN PEREKONOMIAN WARGA KAMPUNG KAIS SORONG SELATAN

Penulis: *Lilis Suryani



Melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE), Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada jajarannya untuk melaksanakan kolaborasi dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong kemiskinan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (kini, Kementerian Pekerjaan Umum) diinstruksikan agar menyiapkan ketersediaan air bersih, sanitasi dan penataan lingkungan, dan memberikan bantuan perbaikan rumah atau pembangunan rumah baru serta relokasi bagi keluarga miskin ekstrem di bidang perumahan.

Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Papua Barat telah merampungkan kegiatan PKE tahun 2024 yang dilaksanakan di Kampung Kais, Distrik Kais, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya.



Kegiatan yang ditangani meliputi prasarana jalan, penyediaan air bersih dan sanitasi yang merupakan hal penting dan penentu dalam mendukung peningkatan perekonomian wilayah.

Kepala BPPW Papua Barat Wahyu Tri Nugroho mengatakan, sarana air bersih, jalan dan sanitasi memiliki pengaruh yang luas baik bagi warga maupun wilayah secara keseluruhan. Oleh karenanya, diperlukan kebijakan yang tepat dalam penyelenggaraannya guna mendukung perekonomian dan pengembangan wilayah.

Penetapan lokasi di kampung Kais berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 136/KPTS/DC/2023 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Terintegrasi Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun Anggaran 2024.

Distrik Kais membawahi 5 kampung, yakni Kampung Tapuri, Benawa I, Sumano, Kais dan Kampung Yahadian. Kampung Kais memiliki luas area 83,465

km² dengan jarak ke ibu kota distrik dan ibu kota kabupaten adalah 153,74 km dan berada di titik koordinat 1°50'58, 139" LS, 132°15'17,425" BT. Jumlah penduduknya sesuai data BPS tahun 2023, sebanyak 621 jiwa dengan rasio laki-laki 318 jiwa dan perempuan 303 jiwa.

Akses transportasi dari Kota Sorong (Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya) ke Sorong Selatan ditempuh sekitar 6 jam dengan jalur darat dan dilanjutkan sekitar 5-6 jam menggunakan kapal motor. Dengan jarak yang begitu jauh, warga dari Kampung Kais membutuhkan biaya transportasi yang lebih mahal karena hanya bisa ditempuh dengan jalur laut atau menyusuri sungai.

"Di pusat kota itulah, warga dapat menjajakan hasil kebun atau lautnya. Namun, karena akses transportasi yang begitu mahal, tentunya membatasi ruang gerak warga sekitar. Melihat kondisi geografisnya, Kampung Kais menjadi penerima program PKE sangatlah tepat. Semoga melalui program PKE ini bisa mendorong perekonomian masyarakat dan memenuhi akses dan layanan dasar masyarakat setempat," ungkap Kepala BPPW Papua Barat.

Selain akses jalan, selama ini warga Kampung Kais masih menggantungkan kebutuhan air bersih dari tadah hujan sehingga masih menyulitkan warga kampung memenuhi kebutuhan air bersih baik untuk dikonsumsi, memasak, maupun kebutuhan MCK.

PPK Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Muhammad Setiawan Trihabibie menambahkan, program kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan di Kampung Kais meliputi, di bidang sanitasi berupa toilet bilik sebanyak 59 unit, dan bidang air minum berupa sambungan rumah sebanyak 135 unit, *reservoir* 1 unit, *intake* 1 unit dan jalan lingkungan.

Habibie mengatakan, pembangunan bilik toilet SPALD-S ini menjadi salah satu sasaran penting dalam

mencapai kehidupan yang layak dan diharapkan dapat mengubah karakteristik biologis dan/atau kimia limbah sehingga tidak berpotensi berbahaya terhadap manusia.

Kepala Kampung Kais Seprianus Aimar, mengucapkan banyak terima kasih melalui program PKE, warga kampungnya kini memiliki sarana dasar yang lebih layak dan memadai. "Terima kasih telah membangun sarana sanitasi, air bersih, jalan dan MCK," ucapnya.

Warga di Kampung Kais belum memiliki sarana air bersih SPAM yang memadai, dan mencukupi kebutuhan air utamanya menggantungkan pada air sungai dan air hujan, hanya beberapa warga yang memiliki sumur gali.

Namun, untuk air dari Sungai Kais tidak bisa dimanfaatkan sepenuhnya karena terpengaruh pasang surut air laut, sehingga untuk sumber air utama, masyarakat berharap pada air hujan.

Sekretaris Kampung Kais Obet Tebe menambahkan, Kampung Kais merupakan kampung terpencil di pedalaman yang jauh dari perkotaan. Ia pun menyampaikan terima kasih karena pemerintah pusat, Kementerian PUPR memberikan perhatian kepada kampungnya yang memiliki jarak sangat jauh.

"Terima kasih kepada bapak Presiden Joko Widodo dan Kementerian PUPR, dapat memberikan bantuan kepada kami di kampung terpencil ini sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian di kampung kami," katanya.

"Terima kasih atas bantuan sarana air bersih, jalan dan sanitasinya. Ini sangat memudahkan kami mencukupi kebutuhan air sehari-hari. Sarana air bersih, kini telah mengalir dan bisa dimanfaatkan bersama. Airnya bagus, dan sudah bisa kita pakai. Sekarang bisa mencuci tangan, membasuh muka melalui saluran air. Terima kasih PUPR sekarang rumah dipenuhi air," imbuh warga lainnya, Yulius Aimar.

Pekerjaan PKE bidang air minum dan sanitasi Desa Kais Kecamatan Kais dilaksanakan dengan kontraktual TA 2024 dengan durasi pelaksanaan pekerjaan selama 180 hari kalender.

Melalui kegiatan yang telah dilaksanakan, diharapkan dapat memenuhi standar infrastruktur kawasan, meningkatkan kualitas hidup dan masyarakat serta mendukung akses layanan air bersih dan sanitasi, menuju Indonesia sehat dan PKE di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

*Penulis adalah *Penyusun Bahan Publikasi BPPW Papua Barat*



SPAM PANTAI SELATAN PENUHI KEBUTUHAN AIR MINUM

| *Rr. Denik Riviani



Dalam rangka mempercepat pencapaian 100% air minum masyarakat yang belum terlayani akses air bersih khususnya di Lombok bagian selatan, Kawasan Pantai Selatan, Kementerian PU melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Nusa Tenggara Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya melaksanakan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan nasional berupa Pekerjaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ITDP Pantai Selatan (Kap. 2 x 50 liter/

detik beserta jaringan perpipaan) untuk menambah ketersediaan air minum di Kabupaten Lombok Timur khususnya kecamatan-kecamatan yang berada di bagian selatan.

SPAM ITDP Pantai Selatan yang bersumber dari dana *loan* ITDP memiliki beberapa item pekerjaan berupa *intake* 2 unit, IPA Baja 50 liter/detik 2 unit, rumah kimia 1 unit, rumah genset 1 unit, rumah pengelola 1 unit, rumah jaga 1 unit, *Sludge Drying Bed* 1 unit, *reservoir* 2000 m³, pipa transmisi 6.500 m, pipa Jaringan Distribusi Pembagi (JDB) 2.657 m, pipa



Jaringan Distribusi Layanan (JDL) 12.741 m, dan 1000 Sambungan Rumah (SR). Adapun sumber air baku SPAM ITDP Pantai Selatan bersumber dari Sungai Tibu Krodet dan telah berfungsi berdasarkan hasil uji operasional IPA serta uji laboratorium terhadap kualitas air.

Air terproduksi yang telah memenuhi kualitas air minum kemudian ditampung di *Clearwell* untuk dipompakan ke *reservoir* induk melalui jaringan pipa transmisi. *Potable water* dari *resevoir* induk tersebut kemudian dialirkan secara gravitasi melalui Jaringan

Distribusi Utama (JDU) dan JDB ke JDL.

Terdapat 3 bangunan *reservoir* yang akan melayani ketersediaan minum yaitu *reservoir* IPA Kota Raja 2000 m³, *reservoir* Sukaraja 600 m³, dan *reservoir* Pemongkang 600 m³. Diharapkan sistem perpipaan ini dapat menjangkau sambungan rumah tangga sehingga dapat mewujudkan penyediaan air minum layak, aman dan berkelanjutan.

Penulis adalah *Koordinator Humas dan Publikasi BPPW NTB



PAMSIMAS PENUHI KEBUTUHAN AIR MINUM DI NTB

Penulis: *Angga Ade Putra



Kementerian PU terus mendorong penyediaan akses air minum bagi masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Salah satu program yang tengah dijalankan adalah Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat (BPPW NTB) dan mencakup empat kabupaten, yaitu Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Dompu, dan Bima.

Di Kabupaten Lombok Tengah, program Pamsimas dilaksanakan di enam desa. Hal serupa juga dilakukan di Kabupaten Lombok Timur, Dompu, dan Bima, masing-masing mencakup enam desa. Dengan demikian, total 24 desa di Provinsi NTB menjadi sasaran utama program ini. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum sekaligus mendukung tercapainya target *Sustainable Development Goals* (SDGs) di bidang air minum dan sanitasi.

Pekerjaan dalam program Pamsimas ini mencakup berbagai komponen utama yang dirancang untuk



memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara berkelanjutan. Beberapa item pekerjaan yang dikerjakan antara lain pembangunan sumur bor untuk sumber air, pembangunan tower air, serta rumah pompa dan rumah panel. Selain itu, terdapat pekerjaan *broncap*, jaringan perpipaan, dan Sambungan Rumah (SR) untuk memastikan distribusi air dapat menjangkau setiap rumah tangga di desa sasaran.

Melalui pendekatan berbasis masyarakat, program Pamsimas diharapkan tidak hanya menyediakan infrastruktur, tetapi juga memberdayakan masyarakat setempat untuk turut berperan aktif dalam pengelolaan dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum. Dengan begitu, keberlanjutan program ini dapat terjaga, dan manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang oleh masyarakat.

Hasil pembangunan Pamsimas oleh BPPW NTB Tahun Anggaran 2024 antara lain *reservoir* 11 unit,

menara air 10 unit, rumah panel 1 unit, bangunan broncap 1 unit, sumur bor 9 unit dan Sambungan Rumah sebanyak 2.064 unit. Selain itu, pengerjaan pembangunan Pamsimas juga menyerap tenaga kerja sekitar 6.135 orang. Sarana air minum yang telah dibangun tersebut, diharapkan mampu melayani sebanyak 8.256 jiwa, sehingga bisa meningkatkan capaian akses aman air minum di Provinsi NTB.

Kepala BPPW NTB Yanuar Seto Nugroho menyatakan bahwa program ini merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan air minum, terutama di daerah yang selama ini masih mengalami kesulitan akses air minum. “Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan baik dan turut menjaga agar sistem yang sudah dibangun dapat terus berfungsi optimal,” ujarnya.

Dengan selesainya pembangunan infrastruktur Pamsimaas di 24 desa ini, diharapkan angka cakupan akses air minum layak di Provinsi NTB akan meningkat secara signifikan. Program ini juga diharapkan dapat menginspirasi kolaborasi lebih lanjut antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam memperluas akses air minum ke seluruh pelosok di NTB.

Penulis adalah *Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi BPPW NTB





AQUABIKE 2024 SUKSES DIGELAR DI DANAU TOBA

Penulis: *Dedy Hendrawan Nuryanto

Indonesia kembali menjadi tuan rumah *Aquabike Jetski World Championship 2024* pada 13-17 November 2024 di Danau Toba. Gelaran internasional ini menghadirkan lebih dari 100 pembalap dan crew dari 30 negara, termasuk 10 pembalap Indonesia. Ini merupakan kali kedua Danau Toba menjadi tuan rumah untuk *event water sport*. Sebelumnya, di tahun 2023 acara serupa juga sukses digelar. Menariknya, pada tahun 2024 ini ada dua infrastruktur yang resmi menjadi venue utama *Aquabike Jetski World Championship*, yaitu Pantai Bebas Parapat dan *Waterfront Pangururan*.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Utara Deva Kurniawan Rahmadi, yang menyaksikan langsung *event* internasional tersebut menyampaikan, *Aquabike Jetski World Championship 2024* kali ini juga dimeriahkan dengan Pesta Rakyat

Danau Toba yang diselenggarakan di 4 kabupaten besar di sekitar Danau Toba, yakni Kabupaten Karo, Dairi, Simalungun, dan Samosir. Dengan memadukan keindahan olahraga jetski dengan indahnya panorama alam Danau Toba, diyakini akan memberikan daya tarik tersendiri pada *event* olahraga berskala internasional ini.

Deva menambahkan, suatu kebanggaan bahwa infrastruktur yang telah dibangun Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui BPPW Sumatera Utara menjadi *venue* utama pada *event* ini, salah satunya Pantai Bebas Parapat. Kawasan ini berada



di Kabupaten Simalungun memiliki luas sekitar 10.000 meter persegi meliputi penataan Kawasan Pantai Bebas, pembangunan gerbang kawasan, dan penataan Ruang Terbuka Publik Parapat yang selesai dikerjakan pada tahun 2022. Ini membuktikan infrastruktur ini telah berhasil dan berfungsi dengan baik.

Pada Pantai Bebas Parapat juga terdapat menara pandang yang dapat digunakan untuk melihat Kota Parapat dan Danau Toba secara lebih detail sambil bersantai menikmati *sunset* dan senja di tepian danau. Selain itu, di Pantai Bebas Parapat juga tersedia area olah raga yang dilengkapi dengan area *skateboard*, *jogging area*, dan *spot selfie*.

“Ruang terbuka Publik Parapat yang merupakan bagian dari Pantai Bebas Parapat juga menjadi infrastruktur yang tidak kalah meyakinkan pemandangan yang indah, RTP yang didominasi



dengan ornamen adat Batak ini juga diperuntukan juga untuk kapal wisata yang bersandar kemudian membawa para pengunjung berkeliling Danau Toba atau menyeberang ke Pulau Samosir untuk berbelanja pernak pernik di pasar Tomok,” tutup Deva.

*Penulis adalah *Tenaga Pendukung Bidang Pendokumentasian Informasi BPPW Sumatera Utara*



MEMORIAL LIVING PARK MENJADI MAGNET BARU DALAM SEJARAH ACEH

Penulis: *Khairan Fitria



Presiden Joko Widodo pada 27 Juni 2023 melakukan peluncuran atau *kick off* implementasi rekomendasi Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (TPP HAM) Berat Masa Lalu di Rumoh Geudong, Pidie, Aceh. *Kick off* ini diinisiasi oleh Ketua Pengarah TPP HAM sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD. Rumoh Geudong dipilih jadi lokasi kegiatan *kick off* karena salah satunya dianggap jadi tempat tahanan sekaligus penyiksaan terhadap masyarakat Aceh yang diduga sebagai kombatan GAM yang terjadi antara tahun 1989-1998. Peristiwa Rumah Geudong itu kemudian menjadi salah satu dari 12 pelanggaran HAM berat yang diakui negara.

Rumoh Geudong dibangun pada tahun 1818 oleh Ampon Raja Lamkuta, Uleebalang. Semasa perang dengan Belanda, Rumoh Geudong sering digunakan sebagai pos pengatur strategi perang oleh Raja Lamkuta. Setelah Raja Lamkuta wafat, Rumoh Geudong ditempati oleh adik-adiknya. Rumoh

Geudong juga dijadikan sebagai basis perjuangan melawan tentara Jepang. Sejak masa Jepang hingga Indonesia merdeka, rumah itu dihuni oleh Teuku Raja Umar dan keturunannya, anak dari Teuku Keujreh Husein.

Pembangunan ini merupakan bagian dari program Pemerintah melalui pemenuhan hak-hak konstitusional para korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Pembangunan *Memorial Living Park* Kabupaten Pidie di Aceh, merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat dan salah satunya adalah peristiwa yang terjadi di kawasan Rumoh Geudong, tepatnya Gampong Bili, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, dengan total luas 7.015 m².

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Aceh pada Sektor Bina Penataan Bangunan diberikan



tanggung jawab dalam melakukan pembangunan *Memorial Living Park* di Kabupaten Pidie.

Kepala BPPW Aceh Deni Arditya menyampaikan dalam mengikuti instruksi dari Presiden Joko Widodo dalam melakukan Pembangunan Rumoh Geudong menjadi *Memorial Living Park* merupakan suatu niat yang baik untuk masyarakat Aceh.

“BPPW Aceh akan mengikuti instruksi dari Presiden Joko Widodo dalam membangun Rumoh Geudong menjadi *Memorial Living Park*. Ini merupakan niat baik yang dilakukan negara dalam membangun suatu peninggalan sejarah di Aceh. Bukan menghilangkan, bahkan menghapuskan jejaknya, namun ini salah satu bentuk untuk tetap dapat dikenang oleh seluruh masyarakat Aceh, menjadikannya tempat untuk berdoa dan berziarah, serta dapat dikunjungi oleh seluruh masyarakat Aceh,” ungkap Deni.

Dalam wawancara pada Minggu (08/12/2024), Nora, sebagai masyarakat Aceh melihat dalam pembangunan *Memorial Living Park* memiliki potensi untuk mendorong identitas yang kolektif.

“Saya rasa dalam pembangunan Rumoh Geudong menjadi *Memorial Living Park* ini dapat mendorong masyarakat Aceh menjadi identitas yang kolektif dan dapat menjadi magnet baru, agar kemudian dapat merefleksikan diri dan juga belajar dari kejadian yang pernah terjadi. Intinya dapat dipahami dalam semua aspek, baik atau buruk sejarahnya dapat membantu

kita memahami kesadaran dalam berempati dan menghormati para korban,” ungkap Nora.

Memorial Living Park telah selesai dibangun dengan lingkup kegiatan berupa Plaza Penerima/Monumen Awal, Lorong HAM - Sejarah, Taman Perdamaian, Tugu Perdamaian, *Amphitheater*, Lorong HAM - Masa Depan, Masjid, *Playground* dan fasilitas pendukung lainnya. *Memorial Living Park* dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan *memorial*, tempat ibadah dan area terbuka untuk lokasi berkumpul, ziarah serta area pembelajaran bagi pengunjung.

Pemerintah Aceh berharap agar *Memorial Living Park* ini dapat lebih terawat dan dijaga memorialisasi sejarahnya. Masjid yang dibangun dapat dijadikan tempat ibadah, tempat berdoa, dan tempat untuk berkumpulnya masyarakat Aceh. Ini juga merupakan salah satu bentuk kepedulian negara dalam menyelamatkan situs penting bersejarah di Provinsi Aceh.

Penulis adalah *Tim Publikasi BPPW Aceh



PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK DAN TRANSPARANSI

Penulis: *Indriansi Nirwana Sari



Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung (BBSBG) sukses menyelenggarakan Forum Komunikasi Pelanggan (FKP) di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pengujian laboratorium, advis teknis dan bimbingan teknis bidang bahan dan struktur bangunan gedung dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan seperti tokoh masyarakat, pelaku konstruksi, akademisi hingga praktisi yang sebagian besar adalah pelanggan layanan BBSBG.

Selain itu juga untuk menciptakan ruang dialog interaktif antara BBSBG dan pelanggan dalam hal layanan, produk, serta inovasi terkini yang ditawarkan. Melalui komunikasi yang lebih dekat, diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan,

sehingga balai bisa lebih responsif terhadap kebutuhan dan masukan dari para pelanggannya.

Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Dian Irawati menyampaikan pentingnya kegiatan ini selain sebagai bentuk transparansi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, juga sebagai implementasi *core values* ASN yaitu berakhlak. BBSBG sebagai unit pelaksana teknis (UPT) terus membangun Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta menerapkan manajemen anti penyuapan (SMAP). Dalam kegiatan ini, BBSBG juga memberikan apresiasi berupa penghargaan bagi para pengguna layanan dalam tiga kategori, yakni Pelanggan Pengujian Laboratorium, Pelanggan Bimbingan Teknis, dan Pelanggan Advis Teknis.

Acara dibuka dengan *launching* maskot layanan terbaru dari BBSBG, yaitu Kang Batur yang merupakan simbol jiwa semangat dan memiliki tekad dalam memberikan pelayanan secara profesional, integritas, No KKN, Transparan, Akuntabel, dan Responsif atau dikenal dengan 'BATUR PINTAR'. BBSBG juga memperkenalkan layanan digital terbaru yang mempermudah pelanggan dalam mengakses informasi terkait hasil uji bahan, konsultasi, serta informasi antrean pengujian melalui sistem digital yang terintegrasi yaitu TEMAN BATUR. Layanan ini diharapkan mampu mempercepat proses administrasi dan memberikan kemudahan bagi para pelanggan dalam menggunakan layanan BBSBG, khususnya layanan pengujian.

Selain *launching* maskot, BBSBG juga membuka diskusi panel bersama dengan Kepala BBSBG dan Ketua Tim Layanan yang membahas mengenai



layanan pengujian seperti alur layanan, proses pengujian hingga substansi teknis mengenai standar acuan yang digunakan dalam pengujian.

Dalam sesi diskusi, peserta FKP diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan, saran, serta pertanyaan terkait pelayanan yang telah diberikan. Beberapa masukan berharga dari pelanggan diantaranya adalah permintaan peningkatan kualitas pelayanan dalam pengujian bahan bangunan dan percepatan proses penerimaan laporan hasil uji (LHU).

Sebagai hasil dari forum ini, BBSBG berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap masukan dari para pelanggan. Beberapa langkah yang akan dilakukan dalam waktu dekat antara lain peningkatan kapasitas

laboratorium pengujian bahan, peningkatan kompetensi untuk teknisi dan *engineer* laboratorium, serta peningkatan layanan berbasis digital untuk mempermudah akses informasi dan mempercepat layanan bagi para pelanggan.

Diharapkan komunikasi yang terjalin antara BBSBG dan pelanggan akan terus berlanjut serta berkontribusi pada perkembangan sektor bangunan yang lebih inovatif dan berkelanjutan di masa mendatang.

*Penulis adalah *Perekayasa Ahli Pertama Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung*





MASJID NEGARA IKN BISA UNTUK SALAT IDULFITRI 2025

Penulis: Solihin / BPPW Kalimantan Timur

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti melanjutkan kunjungan kerja di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan meninjau pembangunan Masjid Negara IKN, Kalimantan Timur, Minggu (1/12/2024). Pekerjaan Masjid Negara telah mencapai 45% sejak

dilaksanakan *ground breaking* oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (18/1/2024) lalu dan direncanakan dapat digunakan untuk Salat Idulfitri Tahun 2025. Dalam kunjungannya, Wamen Diana meminta agar proses tutup atap atau *topping off* dapat selesai Desember 2024 sehingga secara struktur sudah dapat digunakan mulai Maret 2025. "Tolong perhatikan progres, lebih dipercepat lagi. Saya minta

Maret memasuki Ramadhan sudah selesai dan bisa digunakan Salat Idulfitri di sini,” kata Wamen Diana.

Masjid Negara Ibu Kota Nusantara dibangun di atas lahan seluas 32.125 m² dengan luas bangunan masjid 61.596 m². Selain itu juga bangunan komersial seluas 2.212 m² (2 lantai), dan bangunan penunjang seluas 727 m² (1 lantai).

Bangunan masjid terdiri dari tiga bagian yaitu Kubah Utama, Plaza Terbuka dan Minaret. Kubah Masjid mengambil konsep simbol sorban dan bentukan galaksi andromeda sebagai ketakberhinggaan semesta alam raya. Kemudian Plaza Terbuka memberikan ketegasan aksis arah Kiblat, menerus ke arah Menara Minaret. Bentukan Minaret yang dinamis menghadirkan putaran semesta meliuk ke atas atau keilahan.



Turut mendampingi Wamen Diana, Kepala BBPJN Kalimantan Timur Hendro Satrio, Kepala BWS Kalimantan IV Yosiandi Radi Wicaksono, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kaltim Rozali Indra Saputra, dan Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Wilayah Kalimantan II Anggoro Putro.



DUKUNGAN SARANA NATAL 2024 DAN 1

41 TITIK LOKASI DI 19 PROVINSI



Status: Data Per 26 Desember 2023

A DAN PRASARANA TAHUN BARU 2025

Anda Perlu Tahu

- 32 unit Mobil Toilet Kabin
- 27 unit Mobil Tangki Air
- 23 unit Mobil Vacuum Tinja
- 8 unit Dump Truck
- 18 unit Toilet Portable
- 22 unit Hidran Umum
- 158 Orang Personil



DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA DI PULAU SULAWESI



SULAWESI BARAT

- 1 Mobil Toilet Kabin
- 1 Mobil Tangki Air
- 1 Mobil Vacuum Tinja
- 1 Dump Truck
- 9 Orang Personil

SULAWESI SELATAN

- 2 Mobil Toilet Kabin
- 2 Mobil Tangki Air
- 2 Mobil Vacuum Tinja
- 9 Orang Personil

Status: Data Per 26 Desember 2024

DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA DI PULAU PAPUA



PAPUA

- 1 Mobil Toilet Kabin
- 1 Mobil Tangki Air
- 1 Mobil Vacuum Tinja
- 6 Orang Personil

Status: Data Per 26 Desember 2024

(Per 26 Desember 2024)

KEKOMPAKAN TIM DITJEN CIPTA KARYA



PENINGKATAN KUALITAS JURNALISTIK DAN FOTOGRAFI



SOSIALISASI SIMBG VERSI 3.2

Penulis: Redaksi



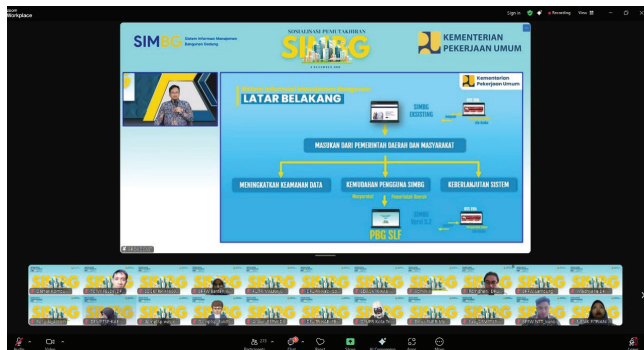
Dalam rangka merespon dinamika regulasi dan intensitas penyelenggaraan Bangunan Gedung di Indonesia, Kementerian PU melalui Direktorat Bina Penataan Bangunan (BPB) Ditjen Cipta Karya melakukan Sosialisasi Pemutakhiran Sistem Informasi

Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) versi 3.2, Rabu (4/12/2024).

“Pemerintah pusat terus berupaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan bangunan gedung melalui pemutakhiran SIMBG dengan berbagai masukan dan saran dari pemerintah daerah serta masyarakat,” ujar Direktur BPB Cakra Nagara. Cakra menambahkan, pemutakhiran ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan data, keberlanjutan sistem, dan kemudahan akses bagi pengguna dalam memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Dalam SIMBG versi 3.2 terdapat beberapa fitur baru, yaitu simulasi retribusi PBG yang membantu masyarakat untuk mengetahui jumlah biaya retribusi PBG sebelum mengajukan permohonan izin bangunan Gedung serta fitur lacak permohonan dengan menggunakan nomor registrasi.

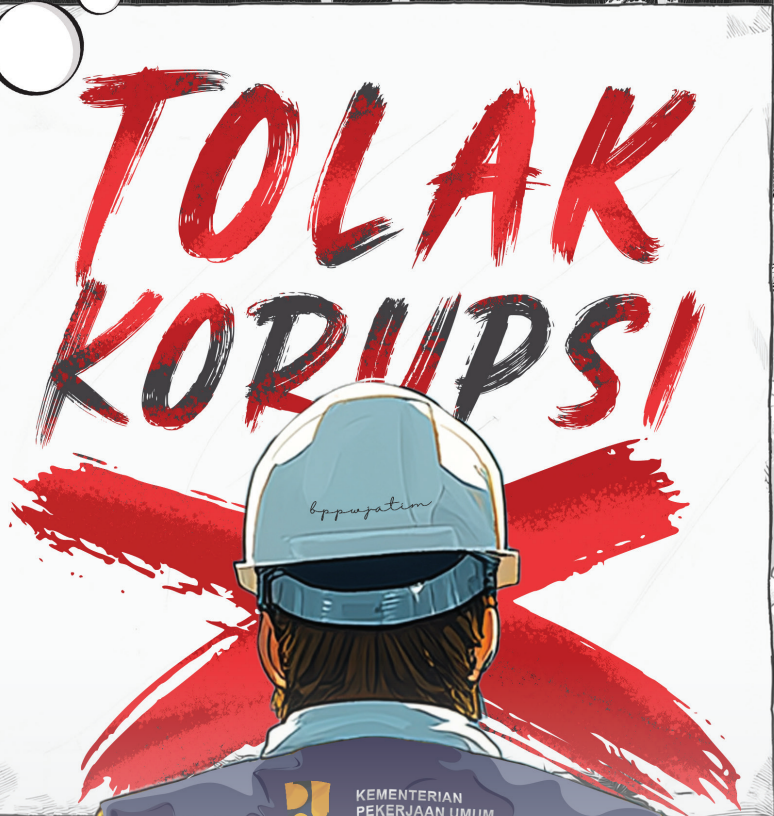
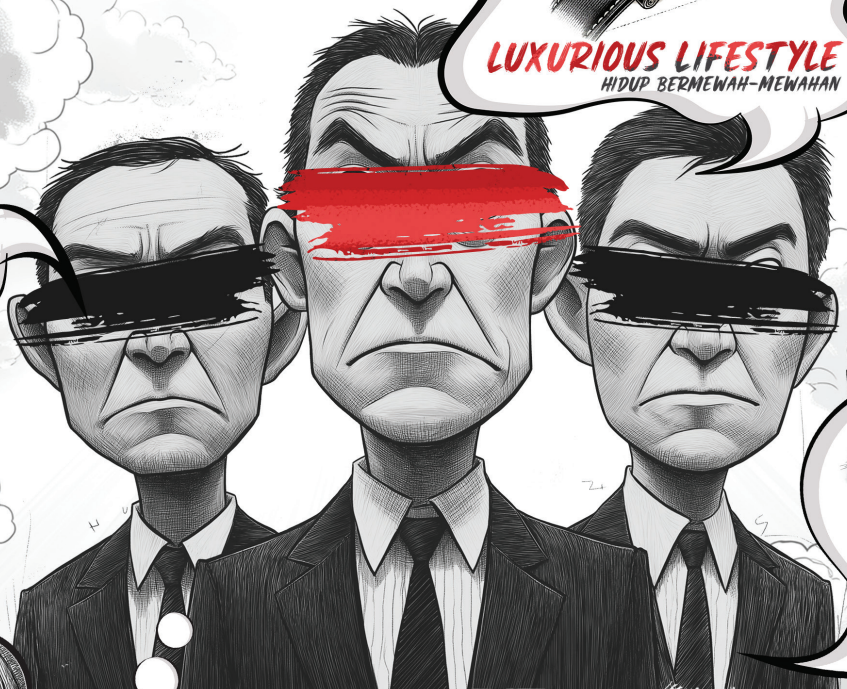
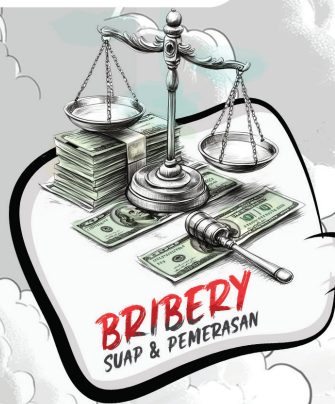
PENGENDALIAN GRATIFIKASI, TINGKATKAN BUDAYA INTEGRITAS BERANTAS KORUPSI

Penulis: Redaksi



Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Kementerian PU 2024, Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Direktorat Kepatuhan Intern menyelenggarakan Sharing Session yang mengusung tema Program Pengendalian Gratifikasi, Kamis (05/12/2024) di Jakarta.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyampaikan bahwa salah satu misi besar yang dicanangkan Presiden melalui Asta Cita adalah memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta mengintensifkan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam konteks ini, pengendalian gratifikasi menjadi elemen penting reformasi birokrasi, tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk membuka ruang diskusi seputar budaya anti korupsi dan pengendalian gratifikasi di lingkungan kerja, kegiatan sharing session menghadirkan narasumber Insan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Nasional Fitriyani Anggraini dan juga Ketua Satgas Pengendalian Gratifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Mutiara Carina Rizky Artha.



SELAMAT HARI BAKTI PU KE **79**



DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM